

Tadi Siang Kamis, diselenggarakan Rapat Koordinasi BPJS berupa Advokasi Pemda DIY, Implementasi sistim rujukan wilayah yang berlangsung di Gedung Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta. Dalam pengarahannya Sekda DIY, Drs. Ichsanuri menyampaikan bahwa dalam regionalisasi pelayanan kesehatan diharapkan jangan sampai menghambat masyarakat untuk berobat.

Sekda DIY menambahkan, di tahun 2015 selain sudah dilaksanakannya PBJS kesehatan juga akan dilaksanakannya pula BPJS di bidang ketenagakerjaan, karenanya pelaksanaannya harus lebih hati-hati karena tidak hanya perawatan di bidang kesehatan, akan tetapi juga merupakan asuransi di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. RA. Arida Oetami, MKes menemukakan mengenai
Jenjang Rujukan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 yang pada pelaksanaan dilapangan masih ada beberapa hambatan. Ditandaskannya seperti yang terdapat dalam pasal 9 bahwa
pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan : rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau tingkat kedua. Selain itu rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat kedua harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau Tingkat ketiga.

Hal ini menurut dr. Oetari harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan. Namun dikecualikan apabila dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

Sementara itu Kepala BPJS dr. Donni Hendrawan, MPH, mengemukakan antara lain bahwa, peserta BPJS kesehatan mendapat pelayanan yang sama, namun dalam hal ini bersifat gotong royong, walaupun terdapat adanya tantangan yang berupa aspek demand maupun supply.

Kegiatan sehari tersebut diikuti oleh Sekda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Sosial, Bappeda, BKD serta Dikcapil yang kesemuanya berasal selain DIY, juga Kabupaten/Kota. (teb)